

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN</b>	
	1
<b>BAB II</b>	
<b>BENCANA PANDEMI COVID-19</b>	
	7
1. Belakangan Terjangkit dan Belakangan Pula Melakukan Tes Covid-19 Dibanding Negara Lain	10
2. Data yang Berbeda-beda	15
3. Pada Awalnya Pejabat Publik Indonesia Terkesan Meremehkan dan Indonesia Masih Gagap Menghadapi Pandemi Covid-19	23
4. Setelah WHO Menyatakan Virus Corona Sebagai Covid-19 dan Bersifat Pandemi, Barulah Terdapat Kebijakan dan Langkah Pemerintah yang Lebih Konkret dan Lebih Terstruktur Menghadapinya	37
5. <i>Lockdown</i> atau Karantina Wilayah, <i>Social Distancing</i> atau Pembatasan Sosial Berskala Besar Menjadi Wacana Publik yang Ramai	41
6. <i>Lockdown</i> di Beberapa Negara	54
<b>BAB III</b>	
<b>KERANGKA LEGAL DAN PELAKSANAANNYA</b>	
	57

## BAB IV

<b>PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB)</b>	65
1. Berbagai Aktivitas Selama PSBB yang Diatur dengan Permenkes Akan Cenderung Diintervensi Oleh Kementerian/Lembaga (K/L) Lain	70
2. Syarat Pengajuan PSBB Terlalu Sulit Bagi Daerah, Sementara Penanganan Covid-19 Memerlukan Gerak Cepat Wacana Publik yang Ramai	77
3. Apa yang Harus Sebaiknya Dilakukan Selama PSBB dengan PP yang Merupakan Perbaikan atas PP No. 21 Tahun 2020, Bukan Hanya dengan Peraturan Menteri Kesehatan	81
4. Jika PSBB Telah Dipilih Menjadi Kebijakan Utama dalam Penanggulangan Covid-19 Maka Sebaiknya Dilaksanakan dengan Tegas dan Lempang	88
5. PSBB Sebaiknya dan Seharusnya Diatur Rinci dengan Peraturan Pemerintah	93
6. PSBB Seharusnya dengan Sanksi yang Jelas	102
7. Fasilitas Kesehatan yang Diperlukan Tidak Terpantau dengan Jelas	119

## BAB V

<b>KEBIJAKAN TRANSPORTASI</b>	125
1. UU No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan Juga Mengatur Transportasi	126
2. Kontroversi Ojek Sebagai Angkutan Umum yang Tidak Kunjung Berhenti	144
3. Mudik, Kebijakan Pemerintah yang Tidak Jelas	154
4. Kebijakan Transportasi Harus Adil pada Semua Moda Transportasi Ojek <i>Online</i> dan Angkutan Udara Diistimewakan	164
5. Angkutan Urban/Suburban/Perkotaan	187

## BAB VI

<b>KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA, STABILITAS KEUANGAN</b>	191
1. Kinerja Ekonomi Keuangan Masih Terkendali	194
2. Kebijakan OJK Tidak Efektif Karena Mengatur Keringanan Nasabah dan Kurang Insentif untuk Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank	198
3. Nilai Rupiah Berfluktuasi Namun Tidak Terlalu Buruk	205
4. Paket Kebijakan Kementerian Keuangan untuk Pajak dan Bea Cukai	206

## BAB VII

<b>DANA PERLINDUNGAN SOSIAL (SOCIAL SAFETY NET)</b>	207
1. Bantuan Sosial Sembako yang Belum Segera Cair	207
2. Dana untuk Kartu yang Dapat Lebih Efektif	212

## BAB VIII

<b>SEKTOR TERDAMPAK LANGSUNG PANDEMI COVID-19 DENGAN KEBIJAKAN TERBATAS -CONTOH SEKTOR PARIWISATA</b>	223
1. Ketidakcepatan Tanggap Pemerintah dalam Penanganan Dampak Covid-19 Terhadap Industri Pariwisata	225
2. Kebijakan yang Kurang Efektif	227
3. Rencana Mitigasi Krisis Pariwisata dan Keterbatasan Wewenang Kemenparekraf dan Proyeksi Industri Pariwisata	229
4. Kementerian Seyogianya Membuat Peta Jalan dan Pemerintah Memberikan Bantuan yang Bersifat Spesifik dan Efektif untuk Membangkitkan Industrinya	233

**BAB IX**

**PERKEMBANGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH 235**

1. Presiden Menerbitkan Keppres No. 12 Tahun 2020 Tanggal 13 April 2020, tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid -19) Sebagai Bencana Nasional 236
2. Kebijakan Pemerintah Mulai Menunjukkan Hasil 238
3. *Exit Strategy* 242

**BAB X**

**ABSTRAKSI 245**

**Tentang Penulis 257**